

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu alat mengubah pola pikir seseorang untuk lebih maju lagi, berfungsi mengembangkan potensi manusia dan mengembangkan peradaban suatu bangsa yang bermartabat. Kemampuan daya pikir manusia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, agar kelak nantinya berguna bagi dirinya dan masyarakat umumnya. Pendidikan nasional menjamin persamaan dalam peluang menempuh pendidikan, meningkatkan kualitas dan efektif serta efisiensi pengawasan pendidikan. Persamaan dalam menempuh sekolah yang dilakukan pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan keharusan belajar sampai jenjang pendidikan kelas 3 SMP. Peningkatan kualitas sekolah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sepenuhnya dengan olah hati, olah pikir untuk mampu berlomba dalam menghadapi persaingan dunia.

Hal ini terjadi sebagai dampak dari perhatian penuh pemerintahnya kepada sektor pendidikan yang menyebabkan SDM mereka berkualitas. Atensi pemerintahnya terhadap sektor pendidikan menjadi tujuan utama dari pada pembangunan sektor lainnya. Mereka tidak menjadikan sekala prioritasnya pada sektor ekonomi dan pembangunan fisik, tapi juga lebih menitikberatkan kepada sektor pendidikan yang bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas mampu membawa bangsanya kepada persaingan dunia yang begitu kompetitif.

Kondisi yang ada dilapangan ditemukan bahwa masih banyak siswa di Indonesia ini berusia sekolah yang berasal dari keluarga miskin, sehingga kecendrungan masyarakat untuk

tidak melanjutkan pendidikan penerus mereka kepada perguruan tinggi, walaupun dapat melanjutkan mereka menghadapi hambatan dalam melengkapi biaya-biaya pendidikan sehingga muncul kekhawatiran terhadap ketidakmampuan mereka menyelesaikan pendidikan. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya manusia Indonesia. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Dalam kaitan dengan pemerataan pendidikan dan terciptakan pendidikan yang berkesinambungan, persamaan peluang dalam menuntut ilmu bisa menciptakan SDM yang bermutu yang menjadi sebab menentukan kekuatan suatu bangsa. Menyadari hal itu pemerintah telah menetapkan peningktan kualitas SDM sebagai sasaran prioritas dalam peningkatan Indonesia yang realisasinya didasarkan kepada kebijakan-kebijakan yang diambil yaitu program pendidikan gratis bagi pendidikan 12 tahun khususnya pendidikan negeri di Kota Padang.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan program/kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program/kebijakan yang telah diputuskan, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Pendidikan memiliki peranan strategis menyiapkan generasi berkualitas untuk kepentingan masa depan. Bagi setiap orang tua, masyarakat, dan bangsa pemenuhan akan pendidikan menjadi kebutuhan pokok. Pendidikan dijadikan bagian utama dalam upaya pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan suatu bangsa.

Sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional ada dua hal khusus yang berkenaan dengan hal tersebut adalah :

1. menetapkan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% baik pada APBN dan APBD, kebijakan pendidikan yang merupakan amanat dari UUD 1945 amandemen ke empat pasal 31 ayat 4,
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan baik setiap warga Negara. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan gratis bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun yang dikenal sebagai wajib belajar sembilan tahun.

Dengan adanya program itu pemerintah Kota Padang mengarahkan pada program pendidikan gratis bagi sekolah negeri tingkat SD, SMP dan SMA/SMK sebagai salah satu program andalan, tentunya melibatkan semua pihak-hak yang terlibat dalam persoalan pendidikan ini.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis dan kewajiban menuntut ilmu dibangku sekolah 12 tahun yang dicanangkan Pemerintah Kota Padang. Pejabat daerah kota Padang membuat program mengenai anggaran yang biasa digunakan disekolah-sekolah. Untuk mengatasi biaya investasi dan biaya operasional SD/SMP/SMA/SMK Negeri yang belakangan ini turut dibiayai dari uang pembangunan/sumbangan komite, untuk selanjutnya akan ditanggung dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN dan dana yang berasal dari APBD Kota Padang dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kebijakan ini terhitung mulai tahun ajaran 2014/2015. Dengan

harapan kebijakan ini akan menolong rakyat Indonesia yang tergolong ekonomi lemah bisa merasakan pendidikan tanpa memikirkan biaya sekolah lagi. Dengan begitu masyarakat miskin tidak perlu cemas akan masa depan anaknya. Diharapkan juga kebijakan ini berlanjut pada pemerintahan selanjut siapapun itu wali kotanya.

Kendala anak bersekolah biasanya berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, serta berkaitan dengan uang sekolah yang dirasakan berat oleh masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Sebab itu pemerintah melalui Kota Padang melalui Dinas Pendidikan mencanangkan kebijakan pendidikan gratis. Kebijakan tersebut merupakan suatu ikrar politis sekaligus ikrar manajemen. Dari sudut pandang politik pernyataan gratis bisa dipahami oleh orang tua tidak dipungut biaya sama sekali. Bagi wali siswa yang anaknya sekolah SD, SMP dan SMA/SMK negeri. Namun dilihat dari sisi manajemen, pernyataan gratis tidak berarti sepenuhnya gratis. Program pendidikan gratis merupakan program untuk diarahkan dalam membentuk persepsi stake holder pendidikan dasar, berasal dari orang tua wali murid yang anaknya terdaftar pada SD, SMP dan SMA/SMK negeri, karena dengan adanya program ini mereka tidak lagi harus menanggung biaya langsung bagi anaknya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan.

Pemerintah sudah mencanangkan pendidikan gratis tapi kenyataan ril di lapangan, pendidikan tidak sepenuhnya gratis. Hal ini membuat kalangan tertentu sulit untuk mengakses pendidikan, padahal pendidikan merupakan faktor utama bagi seseorang dalam memajukan kualitas hidup yang lebih baik. Dimana masih adanya pembayaran yang dilakukan sekolah seperti pembelian seragam sekolah yang sudah disediakan pihak sekolah tentunya harganya tidaklah sama dengan harga toko diluar, selain itu adanya pembayaran komite sekolah, uang buku tulis maupun buku cetak. Sehingga apa yang diisukan gratis itu tidak serta merta gratis semuanya bahkan hampir sama dengan biaya sekolah sebelumnya.

Inilah yang merupakan keluhan wali siswa yang status ekonomi menengah kebawah bagi yang mampu tentunya ini bukanlah persoalan yang berat namun bagi masyarakat yang tergolong rumah tangga miskin ini sangatlah memberatkan.

Menurut data yang didapatkan tingkat anak berhenti sekolah dari berbagai tingkatan pendidikan disekolah negeri di Kota Padang masih mengalami kenaikan walaupun kenaikan itu tidak tinggi, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Data Jumlah Anak Berhenti Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan (%)

Bidang	No	Jenjang Pendidikan	Tahun					Jumlah
			2011	2012	2013	2014	2015	
Pendidikan	1	SD	0,17	0,15	0,21	0,21	0,22	0,96
	2	SMP	0,49	0,45	0,37	0,44	0,46	2,21
	3	SMA/SMK	0,87	0,88	0,89	0,92	0,95	4,51
Total			1,53	1,48	1,47	1,57	1,63	7,68

Sumber :BPS Sumatera Barat (2017)

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat anak berhenti sekolah tahun 2014 awal berlakunya program pendidikan gratis bila dibandingkan tahun 2015 naik sebesar 0,01 persen dari 0,21 persen tahun 2014 naik sebesar 0,22 persen tahun 2015 untuk tingkat SD, tingkat SMP juga mengalami kenaikan sebesar 0,02 begitu juga untuk tingkat pendidikan SMA/SMK naik sebesar 0,03 persen. Walaupun demikian kita sedikit berbangga karena kenaikannya tidak begitu besar artinya program pendidikan gratis ini berdampak baik untuk masyarakat kurang mampu di Kota Padang walaupun belum maksimal.

Untuk mengetahui persoalan yang terjadi diatas, maka menarik untuk dilakukan sebuah kajian ilmiah bertemakan : “Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pendidikan Gratis di Kota Padang”.

1.2 Rumusan Persoalan

Dengan melihat penjelasan sebelumnya, maka persoalan yang akan penulis kaji dalam penulisan ilmiah ini adalah : Bagaimana pandangan masyarakat Kota Padang terhadap kebijakan pendidikan gratis yang diprogramkan pemerintah Kota Padang sudah sesuai atau belum dan manfaat kebijakan pendidikan gratis ini bagi masyarakat Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melihat uraian dan rumusan persoalan diatas, maka penulisan ilmiah ini bertujuan : menggali pandangan masyarakat terhadap program pendidikan gratis yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Padang. Selain itu penelitian ini juga melihat manfaat program ini bagi masyarakat Kota Padang yang merupakan objek utama dalam kebijakan ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil kajian ilmiah ini diharapkan berguna bagi :

1. Kegunaan yang bersifat teoritis

Kajian ilmiah ini diharapkan bisa memperluas wawasan dan memberikan sumbangan informasi bagi para ilmuwan ekonomi sehingga dapat memperkaya dan

mengembangkan kajian ilmu pengetahuan, khususnya di bidang program kebijakan umum mengenai pendidikan.

2. Kegunaan yang bersifat praktis

a. Bagi Penulis

Meningkatkan wawasan pengetahuan penelitian serta menguji kemampuan analisis masalah berdasarkan teori yang pernah di dapat selama studi, khususnya hal yang berkaitan dengan Ekonomi Sektor Publik.

b. Bagi Mahasiswa

Memberikan contoh kecil pembuatan skripsi, khususnya berhubungan tentang sebuah kebijakan publik yang menyangkut dengan pendidikan, sehingga diharapkan mahasiswa ikut terlibat dalam menyampaikan ide maupun gagasannya yang merupakan bagian dari masyarakat umum.

c. Bagi Universitas

Dapat menambah dan memperkaya hasil-hasil penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik akan pendidikan.

d. Bagi Masyarakat Luas

Dengan adanya penulisan ini masyarakat yang awalnya tidak mengetahui akan manfaat ataupun keluhan akan kebijakan ini dapat mengetahui dengan begitu masyarakat bisa ikut serta sebagai pengawas sekaligus objek dari kebijakan ini

1.5 Batasan Penulisan

Agar penulisan ini fokus pada pokok permasalahan yang sebenarnya, maka peneliti memberi pembatasan masalah. Masalah yang dibahas dalam kajian ini adalah menyangkut

program pendidikan gratis yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Padang ini sudah tepat bagi masyarakat atau belum, acuannya adalah masyarakat Kota Padang yang memiliki anak sekolah ini baik itu tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK negeri yang ada di Kota Padang

1.6 Sistematika

Agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih mempermudah mengenai isi skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi :

BAB I :

PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah sebagai alasan dari pengambilan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II :

TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori sebagai kerangka acuan pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti dan sebagai dasar analisis yang diambil dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III :

METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan mengenai metode penelitian. Hal-hal yang terkandung dalam bab ini antara lain variabel penelitian termasuk pengukurannya dan definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Berisikan gambaran umum (deskripsi objek penelitian yang diperoleh). Serta gambaran responden yang dijadikan bahan penelitian dalam hal ini masyarakat Kota Padang sebagai objek dalam kebijakan ini.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hasil studi yang dilakukan, analisis dan interpretasi hasil setelah menggunakan metode analisis data yang ditetapkan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, yang akan mengemukakan bagaimana kesimpulan dari uraian, analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Disamping itu dalam bab ini juga akan di kemukakan beberapa keterbatasan dan saran bagi penelitian selanjutn



